

DAFTAR PUSTAKA

- Ertrivana, D., Meihendri., Herawati. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Journal Akuntansi Universitas Bunghatta*, Vol 6, No.1. 1-9.
- Fuadi, A. O, dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting*, Vol 1, No1. 18-26..
- Ilhamsyah, R. Endang, M. G. dan Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 8, No.1. 1-9.
- Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax dan Accounting*, Vol.1 No. 1. 50-54.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*, Vol 2 No.1, 1-15.
- Kotler, P. (2000). *Marketing Management*. United States Of America: Prentice-Hall, Inc.
- Lewis, T.M. dan Atherley, B. A. (1996). "Analysis of Construction Delays". *The organization and Management of Construction: Managing the Construction Project and Managing Risk*, Vol 2, Eds D.A. Langford & A. Retik, London: E & FN, pp 60-71
- Lumanauw, F. (2015, maret 09). *Cyber Sulut News*. Retrieved from <http://cybersulutnews.co.id/104-kendis-pemkab-belum-diregistrasi-kembali/>
- Mahaputri dan Novicara (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universita Udayana*. Vol. 17 No 3, 2321-2351.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Menteri Keuangann Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Moakalu, B. J. (2014). Gaya Hidup Prahara Karakter Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol. 1 No1.
- Moleong, J. L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Pinori, M. Sompie, B.F. dan Willar, D. (2015). Analisis Faktor Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Gedung Terhadap Mutu, Biaya Dan Waktu Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Jurnal Media Engineering. Vol. 5 No 2.
- Putra, I. M. dan Jati, I. K (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. 557-587.
- Putri, A. S. dan Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. 661-677.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undan No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah & Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Tentang Apartur Sipil Negara.

- Rompas, R. (2016, February 29). *New Manado Today*. Retrieved from <http://www.manadotoday.co.id/2016/02/18201/tak-lunas-pajak-puluhan-kendis-roda-2-di-minahasa-ditarik-bpkbmd/>
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, No 02, XXXV, 44-54.
- Saleh, I. M., Ridwan., dan Nella. (2011). Hubungan Antara Pengetahuan Merek Sozzis Dengan Volume Pembelian Produk Sosis Merek Sozzis Pada PT. Carrefour Cabang MTC Karemosi Makassar. *Jurnal Agribisnis*, 58-68.
- Sarwono, S. W. (2013). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sujanto, A. (1985). *Psikologi Umum*. Aksara Baru.
- Susilawati, K. E dan Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4.2. 345-357.
- Team Pustaka Phoenix. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP DI Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3. 999-1008..
- Tjahjono, A. dan Husein, M. F. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN UPP STIM YKPN.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wade, C dan Tavris, C. (2007). *Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widnyani, I. A. D. dan Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16. No 3. 2176-2230.